

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran penelitian, sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan temuan penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ini dapat diidentifikasi: (1) Sumber dana pendidikan pada tingkat SLTP Negeri yang tersebar di empat wilayah Kota Bandung masih bertumpu pada sumber dana pemerintah pusat dan orang tua siswa. (2) Perolehan dana pendidikan pada tingkat SLTP Negeri yang tersebar di empat wilayah Kota Bandung bervariasi sesuai dengan jumlah siswa, usia sekolah, dan kemampuan orang tua siswa. (3) Subsidi pemerintah untuk dana pendidikan masyarakat pada tingkat SLTP Negeri yang tersebar di empat wilayah Kota Bandung rata-rata mencapai Rp. 19.904.055.000,00/tahun dengan distribusi 62,80% untuk belanja pegawai (Gaji dan tunjangan) dan untuk kegiatan pendidikan hanya Rp.2.764.032.000,00 atau mencapai 10,13%. (4) Kontribusi masyarakat khususnya orang tua siswa melalui BP3 setiap tahun mencapai Rp.7.385.992.400,00 atau memberikan kontribusi sekitar 27,06% dari total dana yang dikelola sekolah, yakni dana bersumber dari pemerintah ditambah dengan dana masyarakat. (5) Strategi pembiayaan sejak mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan masih bertumpu pada pengelolaan sumber dana klasik, yakni sumber dana pemerintah dan orang tua.

Oleh sebab itu, belum ada strategi khusus dalam pencarian sumber dana baru. (6) Dampak dari dana pendidikan terhadap kinerja sekolah pada tingkat SLTP Negeri di Kota Bandung, masih bervariasi sesuai dengan kemampuan pendanaan sekolah. Sekolah yang relatif kecil, anggaran kecil kinerja sekolah belum optimal, dan sebaliknya anggaran besar maka kinerja sekolah relatif mengarah kepada peningkatan kualitas.

Adapun secara khusus dapat difokuskan kepada empat sekolah meliputi: SLTP Negeri 5 (Wilayah Utara), SLTP Negeri 18 (wilayah Timur), SLTP Negeri 39 (Wilayah Selatan), dan SLTP Negeri 41 (Wilayah Barat).

### **1. Strategi Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Perencanaan anggaran penerimaan dan belanja sekolah yang dilaksanakan di ke empat sekolah, mempunyai kecenderungan yang relatif sama yaitu dilandasi oleh acuan baku yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pertimbangan yang dijadikan dasar penerimaan anggaran adalah yang bersumber dari pemerintah, yang telah ditetapkan menurut alokasi penggunaan seperti untuk belanja gaji pegawai, tunjangan-tunjangan pegawai, keperluan ATK, jasa, dan inventaris kantor serta keperluan proses belajar mengajar.

Sebagai tindak lanjut dari pertimbangan penerimaan dan utama yang diberikan oleh pemerintah, dalam perencanaan nampaknya setiap sekolah melakukan perhitungan atas dasar analisis kebutuhan aktual. Pada umumnya, kebutuhan aktual cenderung lebih besar dari penerimaan aktual.

Hasil analisis perhitungan kebutuhan tersebut, dijadikan landasan perencanaan anggaran belanja sekolah yang dimusyawarahkan kepada pihak orang tua siswa baru.

Strategi yang diterapkan sesungguhnya adalah penggalian sumber dana partisipasi masyarakat orang tua melalui BP3 untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara minimal. Pemenuhan dari kekurangan anggaran yang diberikan pemerintah melalui DIK dan DBO, melalui musyawarah BP3 dilandasi oleh kemampuan ekonomi secara umum orang tua siswa dan hasilnya dijadikan acuan penetapan rencana pembiayaan.

Ke empat sekolah dalam perencanaan pembiayaan aktual bervariasi, yang dipengaruhi oleh karakteristik sekolah seperti usia sekolah, jumlah siswa, lingkungan sekolah, status sosial ekonomi orang tua. Temuan juga menunjukkan SLTP Negeri 5 (mewakili Bandung Utara) dan SLTP Negeri 18 (mewakili Bandung Timur), memperoleh dana partisipasi orang tua mencapai Rp. 280.000.000,00 atau lebih besar jika dibandingkan dengan SLTP Negeri 41 dan SLTP Negeri 39 sekitar antara Rp. 60.000.000,00 sampai Rp.92.000.000,00.

Dengan demikian strategi perencanaan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya dapat dilakukan berdasarkan konsep-konsep teoretis secara utuh, mengingat ketentuan yang berlaku. Hal itu terkait dengan kebijakan anggaran pendidikan secara nasional yang disebabkan terbatasnya dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ideal. Sedangkan dilihat dari partisipasi orang tua pun sangat ditentukan oleh kesadaran dan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kata kunci dalam strategi perencanaan pembiayaan selama ini belum sepenuhnya menganut suatu pola alternatif dan otonomi.

## **2. Pelaksanaan Pembiayaan**

Pelaksanaan pembiayaan pada hakikatnya adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan berdasarkan administrasi pembukuan. Setiap sekolah dalam pengaturan pembukuan keuangan dilandasi oleh peraturan yang berlaku dimana kepala sekolah sebagai atasan langsung dari bendaharawan, baik itu dana diperoleh dari UYHD maupun DBO.

Mekanisme pengeluaran dan pemasukan keuangan sering ditemukan adanya inkonsistensi dilihat dari objek rencana dan pelaksanaan. Ketidak konsistensian disebabkan oleh faktor-faktor, kebutuhan essensial yang mendesak untuk kepentingan pendidikan yang tidak terdapat atau tidak dibenarkan menurut alokasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa di luar perhitungan rencana, dan adanya biaya-biaya di luar alokasi. Konsekuensinya adalah adanya rekayasa administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban administrasi.

## **3. Pengawasan**

Pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan, bersifat laporan tertulis setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Profinsi, KPN dan Biro Keuangan Depdiknas di Jakarta. Setiap sekolah pelaksanaan pelaporan tersebut, disampaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh pihak Irjen Depdiknas dan BPKP yang waktunya dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun anggaran. Pengawasan dilaksanakan atas dasar bukti fisik administrasi dan jarang terjadi kepada pengawasan yang bersifat proses dalam mekanisme pengaturan pengeluaran, seperti belanja barang atau jasa dilihat dari kualitas, kuantitas, dan bukti legalitas faktor melalui observasi pasar.

Penerimaan dan pengeluaran dana partisipasi orang tua yang dikenal dengan BP 3 selama ini, belum menjadi fokus pengawasan karena dikelola oleh pihak pengurus dan sekolah. Adapun pertanggungjawabannya BP 3 cukup dengan laporan kepada pihak Kantor Dinas Kota dan Propinsi, dan kepada orang tua siswa.

#### **4. Kinerja**

Kinerja sekolah dilihat dari peran dan fungsi sekolah, sebagai dampak pembiayaan secara normatif masih bervariasi. Artinya perolehan dana besar, pembiayaan pendidikan terpenuhi, maka kinerja sekolah cenderung baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sekolah seperti usia sekolah, jumlah siswa, lingkungan sekolah, status sosial ekonomi orang tua. Sekolah seperti diklasifikasikan sekolah besar seperti SLTP Negeri 5, dan kategori sedang seperti SLTP Negeri 18. Sedangkan sekolah kecil yang karakteristiknya cenderung kurang didukung finansial, maka dampak terhadap kinerja sekolah belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan.

Kondisi tersebut, tidak sepenuhnya disebabkan oleh strategi yang dianut melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pendidikan seperti sistem

seleksi berdasarkan NEM, tidak memperhatikan aspek kewilayahan, untuk meningkatkan pemerataan masukan yang terstandar, adanya image masyarakat berkenaan dengan sekolah pilihan.

## B.Saran-Saran

Kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan SLTP Negeri di kota Bandung, tidak seluruhnya disebabkan kelemahan manajerial sekolah akan tetapi ditentukan oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan yang mengarah kepada dua aspek utama yaitu sisi ilmu administrasi dan praktis.

Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Adaministrasi Pendidikan :

“Perlu adanya penelitian lebih lanjut berkenaan dengan ongkos yang dikeluarkan setiap siswa/tahun/bulan di luar dana langsung yang dikelola sekolah, serta strategi untuk mencari alternatif pembiayaan tingkat SLTP Negeri di Kota Bandung”

Adapun saran untuk kepentingan praktis adalah:

1. Adanya kebijakan pemerintah mengenai perubahan pola anggaran, dimana anggaran belanja melalui UYHD setiap sekolah dihitung menurut kebutuhan ideal atas dasar karaktersitik wilayah sekolah, kemampuan masyarakat, dan essensial pendidikan (PBM), yang selanjutnya dijadikan keputusan setelah memperhitungkan kemampuan dana pemerintah dalam menyusun alokasi anggaran.
2. Dana partisipasi masyarakat di luar sumber utama (pemerintah) dan sarana di setiap sekolah, perlu direncanakan melalui pendekatan kepada pihak-pihak masyarakat atau yang dimungkinkan. Seperti penyewaan lapangan olah raga



pada saat sekolah libur, pembukaan warung sekolah, atau bentuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam mengoptimisasi sumber potensi sekolah.

3. Perlu ada pengkajian pihak perencana anggaran nasional, mengenai sistem penggunaan anggaran belanja berimbang ke arah belanja situasional sesuai dengan kebutuhan sekolah, melalui mekanisme yang dapat dikontrol oleh pihak pemerintah atau masyarakat.
4. Perlu ada perubahan sistem pengawasan dari pendekatan pembukuan, ke arah pengawasan belanja aktual dengan kelengkapan pembukuan melalui pemeriksaan barang, atau jasa.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional perlu menata kembali model rayonisasi kependudukan dalam sistem seleksi siswa baru SLTP Negeri, untuk memberikan pemerataan sumber daya sekolah, seperti masukkan siswa yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai akademik. Sehingga tidak ada kesenjangan dan image sekolah pinggiran.

